

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Abas. (2017). *Legitimasi & Politik Kebijakan : Teori dan Praktik*". Depok : Alta Utama.
- Anggraini, T. dkk. (2014) *Kajian Kodifikasi Undang-Undang Pemilu*. Jakarta : Perludem.
- Agutsyati, K. dkk. (2013). *Menetapkan Arena Kursi Perebutan DPRD*. Jakarta : Perludem.
- Arif, S. (2006) . *Demokrasi L Sejarah, Praktik, dan Dinamika Pemikiran* Malang : Averroes dan KID
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Djadijono, M dan Efriza (2011) *Wakil Rakyat tidak Merakyat*. Bandung : CV Alfabeta.
- Efriza. (2016). *Kekuasaan Politik : Perkembangan Konsep, Analisis dan Kritik*. Malang : Intrans Publishing.
- Efriza (2014). *Studi Parlemen : Sejarah, Konsep, dan Lanskap Politik Indonesia*. ppMalang : Setara Press.
- Fischer F, Gerald J Miller, dan Mara S. Sidney (2015). *Handbook Analisis Kebijakan Publik : Teori, Politik dan Metode*. Bandung : Nusa Media.
- Hamad, I. (2004). *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*". Jakarta : Granit.
- Hamzah, A, (2022) *Metode Penelitian Kepustakaan*. Depok : PT RajaGrafindo Persada.
- Handley, L. (2007). *Boundary Delimitation dalam IFES. Challenging the Norms and Standards of Election Administration*. Amerika Serikat : USAID.

- Haryono, (2013). *Arsitektur Demokrasi Indonesia*. Malang : Setara Press
- Heywood, A. (2014). *Politik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Hilmy, M. (2017) . *Jalan Demokrasi Kita*. Malang : Intrans Publishing.
- Holstein J dan Gibrum J,F. (2008) . *Handbook of Contructionist*. New York : The Gulford Press.
- Huda dan Nasef (2022). *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta : Kencana.
- Isharyanto (2016). *Kedaulatan Rakyat dan Sistem Perwakilan Rakyat menurut UUD 1945*. Bandung : Penerbit WR.
- Isharyanto (2017). *Partai Politik, Ideologi dan Kekuasaan*. Yogyakarta : CV Absolute Media
- Juliantara, D (2002).*Negara Demokrasi untuk Indonesia*. Solo : Pondok Edukasi.
- Junaidi, V. dkk. (2013) *Politik Hukum Sistem Pemilu*. Jakarta : Perludem
- Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta : Kencana
- Kartawidjaja, P. R dan Sidik Pramono. (2007). *Akal-Akalan Daerah Pemilihan*. Jakarta: Perludem
- Katiwa, A. (2013). *Sistem Politik Indonesia*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Larasson, Ana dan Helen Ingram. (1997). *Policy Design For Democracy*. Lawrence, KS : University Press of Kansas.
- Mahmuzar. (2019). *Parlemen Bikameral di Negara Kesatuan*. Bandung : Nusa Media.
- Malian, S (2021). *Kebijakan Publik dalam Negara Hukum*. Yogyakarta : Kreasi Total Media.
- Mariana, D dan Caroline Paskarina (2008). *Demokrasi dan Proses Desentralisasi*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

- Maulana, D dan Arif Nugroho (2019). *Kebijakan Publik : Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik*. Banten : CV. AA. RIZKY.
- Michael Moran, Martin Rein, dan Robert E. Godin. (2015). *Handbook Kebijakan Publik*. Bandung : Nusa Media.
- Muzakkar, K. (2008) *Konsepsi Negara Demokrasi Indonesia*. Bandung : Segarsy.
- Nugroho, R (2023). *Public Policy*. Jakarta : PT Gramedia.
- Pamungkas, S. (2012). *Pemilu, Perilaku Pemilih dan Kepartaian*. Yogyakarta : Insititute for Democracy and Welfarism.
- Pamungkas, S. (2009) *Perihal Pemilu*. Yogyakarta : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada.
- Pramusinto, A dan Kumorotomo, W. (2009). *Governance Reform di Indonesia*. Yogyakarta : Gaya Media
- Prasetyo T. (2018). *Filsafat Pemilu*. Bandung : Nusa Media.
- Prasetyo T dan Muhammad. (2020) *Filsafat Pemilu untuk Pemilu Bermartabat*". Bandung : Nusa Media.
- Rasyid, F. A (2020). *Model Perwakilan Politik Indonesia*. Bandung : CV Sentra Publikasi Indonesia.
- Reynolds, A. dkk. (2016). *Desain Sistem Pemilu : Buku Panduan Baru International IDEA*. Jakarta : Perludem.
- Sadhana, K. (2011) *Realitas Kebijakan Publik*. Malang : UM PRESS.
- Sore, U, B dan Sobirin (2017). *Kebijakan Publik*. Makassar : CV Sah Media.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Surbakti, R. (2015). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT Grasindo.

Surbakti, R. dkk. (2011). *Menyetarakan Nilai Suara: Jumlah dan Alokasi Kursi DPR ke Provinsi*. Jakarta : Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

Sulaisi dan Hadiri (2017). *Membaca Ulang Demokrasi Kita*. Pamekasan : CV Duta Media.

Taufiquraakhman. (2014). *Kebijakan Publik*. Jakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers.

Wahab, S, A. (2012). *Analisis Kebijakan*. Jakarta :Paragonatama Jaya.

Wajdi, F dan Andryan. (2021). *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta : Sinar Grafika.

Wattimena, R.A.A (2016). *Demokrasi : Dasar Filosofis dan Tantangannya*. Yogyakarta : PT Kanisius

Wibowo, 1. (2011). *Negara dan Bandit Demokrasi*. Jakarta : PT Kompas Media Nusantara.

#### Sumber Jurnal dan Skripsi

Aji, S.P (2020). *Evaluasi Pembentukan Dapil Pemilu 2019 : Pengukuran Prinsip Kesetaraan Nilai Suara, Proporsionalitas dan Tingkat Kompetisi Tingkat Partai Politik*. Melalui <https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/issue/view/21>

Amalia, D. C. (2022). *Daerah Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan pada Pemilihan Umum Tahun 2019*. Journal of Education, Humaniora dan Social Science. No3 Vol 4.

Azhar, S. Tonny P Situmorang dan Bengkel Ginting. (2023). *Kebijakan Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Deli Serdang Pemilu Tahun 2019*. PERSPEKTIF. No 2 Vol 12.

Hantoro, B. F. (2020). *Pengaturan Hukum Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara. Fakultas Hukum. Universitas Gajah Mada.

- Idrus, A.R, Dwia Arestina Pulubuh dan GustianaA. Kambo. (2019). *Dinamika Perumusan Kebijakan Daerah Pemilihan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 : Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Selayar*. Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik. No 2 Vol 5.
- Kusumawati, M.P (2019). *Harmonisasi antara Etika Publik dan Kebijakan Publik*. Jurnal Yuridis. No 1 Vol 6.
- Lestari, K.W. *Dampak Pembagian Daerah Pemilihan dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis di Dapil III Jawa Barat (Kota Bogor Dan Kabupaten Cianjur)*. Jurnal Politik Muda. No 2 Vol 5.
- Nugroho. M. H. (2023). *Dualisme Kewenangan Pembentukan Daerah Pemilihan terhadap Prinsip Proporsionalitas dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019*. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum. Universitas Lampung.
- Pierce, J. dkk. (2014). *Social Construction and Policy Design : A Review of Past Applications*. No 1 Vol 42.
- Sinaga, K. (2023). *Analisis Partisipasi Publik menuju Demokrasi Berkualitas pada Pemilihan Umum Indonesia Tahun 2023*. No 3 Vol 17.
- Wasist, A dan Rajab, A, (2023). *Dampak Putusan MK Nomor 80/PUU-XX/2022 terhadap Kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam Penataan Daerah Pemilihan*.
- Yulistyawati, E. dkk. (2016). *Penerapan Konsep Trias Politika dalam sistem pemerintahan RI : Studi Komparatif atas UUD Tahun 1945 sebelum dan sesudah amandemen*. Jurnal Dinamika Sosial Budaya. No 2 Vol 18.
- Undang-Undang
- Mahkamah Konstitusi. (2022). *Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 80/PUU-XX/2022*.
- Presiden Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar 1945*.

Presiden Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum..*

Presiden Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.*

Komisi Pemilihan Umum. (2023). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.*

#### Website

Archive.bps.go.id (2019). *Spirit Kolaborasi dalam Sensus Penduduk 2020.* Melalui [archive.bps.go.id/news/2019/07/03/300/spirit-kolaborasi-dalam-sensus-penduduk-2020.html](https://archive.bps.go.id/news/2019/07/03/300/spirit-kolaborasi-dalam-sensus-penduduk-2020.html)

bps.go.id (2021). *Hasil Sensus Penduduk (SP2020).* Melalui <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>

bps.go.id (2024). *[Metode Baru] Aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tingkat Nasional, Pusat, dan Provinsi, 2021-2023.* Melalui <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjE2MiMy/-metode-baru--aspek-indeks-demokrasi-indonesia--idi--tingkat-nasional--pusat--dan-provinsi.html>

Data Indonesia (2023). *Indeks Demokrasi Indonesia Capai 80,41 Poin pada 2022.* Melalui <https://dataindonesia.id/varia/detail/indeks-demokrasi-indonesia-capai-8041-poin-pada-2022>

DPR RI. (2022) *Komisi II Tetapkan Nama Komisioner KPU-Bawaslu.* Melalui <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37656/t/Komisi+II+Tetapkan+Nama+Komisioner+KPU-Bawaslu>

- DPR RI. (2023, Januari 11). *Live Streaming – Komisi II DPR RI RAPAT KERJA DENGAN MENDAGRI, KPU, BAWASLU, DKPP TERKAIT PEMILU 2024*. [Video]. YouTube. [https://www.youtube.com/live/GEQ24cvX\\_hs?feature=shared](https://www.youtube.com/live/GEQ24cvX_hs?feature=shared)
- KPU RI. (2022, Desember 21). *Tindak Lanjut Putusan MK atas Judicial Review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*. [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/live/mOIPzr-uOQo?feature=shared>
- Kompas.id (2019). (Dis)proporsionalitas Kursi DPR 2019 Melalui <https://www.kompas.id/baca/opini/2019/06/25/disproporsionalitas-kursi-dpr-2019/>
- Kompas.id (2023). *KPU Dinilai Maknai secara Parsial Putusan MK soal Dapil Pemilu 2024*. Melalui <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/01/31/kpu-dinilai-maknai-secara-parsial-putusan-mk-soal-dapil-pemilu-2024>
- KumparanNews (2023) *Bedah Data DCT : 93% Anggota DPR Ternyata Nyaleg Lagi di Pemilu Tahun 2024*. Melalui <https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/kumparannews/bedah-data-dct-93-anggota-dpr-ternyata-nyaleg-lagi-di-pemilu-2024-21hhrqFIPmg>
- Perludem. (2022, Oktober 22). *Sidang Perkara Nomor 80 PUU XX 2022 Kamis, 20 Oktober 2022*. [Video]. YouTube. <https://youtu.be/FVzeIei2T-A?feature=shared>
- Polkam.go.id (2024). *Kemenko Polhukam Rilis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2023* melalui <https://polkam.go.id/kemenko-polhukam-rilis-indeks-demokrasi-indonesia-idi-tahun/>